

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI UNTUK MENINGKATKAN HASIL PANEN PADI

Oleh:

Soetarto ¹⁾, Besti Rohana Simbolon ²⁾, dan Sabali Zebua ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-Mail:

soetartouda@gmail.com ¹⁾, rohanasimbolon@gmail.com ²⁾,
dan sabalizebua8747@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

One of the community empowerments that is currently being carried out by the Regional Government at Kelurahan Mabar Hilir is the Rice Farmer Group Program. The research method used is Qualitative method. The Data Collection Techniques used in this study are interviews, documentation and observation. Types and sources of data used in this study are Primary Data and Secondary Data. Based on the results of research that has been described on the Role of Local Government in empowering farming communities to increase rice yields, explains that the government has collaborated with the Department of Agriculture and Maritime Affairs in terms of providing agricultural facilities such as providing plowing machines (Jetor), water pumping machines, subsidized fertilizers, seeds, rice threshing machines by partnering with agricultural field practice (PPL) to provide counseling to farmers. Community empowerment of farmer groups in the village of Mabar Hilir, Medan Deli sub-district has been implemented and has been felt by the farming community well, but in addition there are still obstacles such as agricultural land that is increasingly decreasing, agricultural land ownership and irrigation are not available. The role of the Regional Government in empowering the peasant community is to further strive for the interests of the community in the form of policies so that the community does not experience overwhelmed to work on programs from the Regional Government, namely the farmer group program.

Key word: Role, Local Government, Farmer Group

ABSTRAK

Salah satu pemberdayaan masyarakat yang sedang di laksanakan Pemerintah Daerah saat ini di Kelurahan Mabar Hilir adalah Program kelompok tani padi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Adapun Teknik Pengumpulan Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Jenis dan sumber data yang di gunakan pada penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tentang Peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani untuk meningkatkan hasil panen padi, menjelaskan bahwa pemerintah telah bekerjasama kepada Dinas Pertanian dan Kelautan dalam hal memberikan fasilitas pertanian seperti menyediakan mesin pembajak (Jetor), mesin pompa air, pupuk bersubsidi, benih, mesin perontok padi dengan bermitra kepada penyuluh praktik lapangan (PPL) pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada petani.

Pemberdayaan masyarakat kelompok tani di kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli selama ini sudah terlaksana dan telah dirasakan oleh masyarakat petani dengan baik, tetapi di samping itu masih ditemukan hambatan-hambatan seperti lahan pertanian yang semakin hari berkurang, kepemilikan lahan pertanian dan irigasi yang tidak tersedia. Peran Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat petani lebih mengupayakan lagi kepentingan masyarakat dalam bentuk kebijakan sehingga masyarakat tidak mengalami kewalahan untuk mengerjakan program dari Pemerintah Daerah yaitu program kelompok tani.

Kata Kunci : Peranan, PEMDA, Kelompok Tan

1. PENDAHULUAN

Salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga didasarkan pada pemikiran *management* (pengelolaan sumberdaya lokal), yang merupakan suatu sosok *community based resource* manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan pembangunan, yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat didalam proses pembangunan yang menyangkut diri mereka. Dalam konteks yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat berarti masyarakat yang *powerless* (kurang berdaya/lemah) diberi *power* (kekuatan) melalui pemberdayaan sehingga

masyarakat itu menjadi *powerfull* (penuh kekuatan). Secara konseptual, pemberdayaan atau kekuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pada dasarnya ide utama pemberdayaan akan bersentuhan dengan kemampuan seseorang atau kelompok untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan terlepas dari tujuan dan minat mereka (Suharto, 2017:71).

Pemberdayaan masyarakat Indonesia khususnya petani padi di Kelurahan Mabar Hilir harus menjadi perhatian lebih serius, terencana, terpadu, dan berkesinambungan, serta dipercepat prosesnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan

diatas, maka penulis penasaran dan tertarik mengangkat pembahasan ini dalam penelitian ilmiah yang berjudul dengan: **Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Untuk Meningkatkan Hasil Panen Padi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli.**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi Pemberdayaan menurut Theresia, (2015:91) merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis untuk mendorong semua potensi yang ada bertindak secara evolutif dengan keterlibatan dari semua potensi.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud difokuskan pada aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai komunitas bangsa, yaitu pemberdayaan dibidang kelompok tani padi.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk

memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Kemandirian bukan berarti mampu hidup sendiri tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk bantuan dan atau kerjasama yang tidak menguntungkan. Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade utilitas* dari obyek yang diberdayakan. Menurut Sedarmayanti, (2013:105) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Oleh karena itu pemberdayaan terhadap masyarakat merupakan upaya

secara terus menerus untuk meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Kemiskinan dapat dikategorikan sebagai berikut, terbatasnya modal yang dimiliki, pengetahuan yang minim dan keterampilan yang kurang. Selain itu rendahnya produk yang dimiliki, rendahnya pendapatan, bahkan rendahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan sedikitnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Ciri-ciri kemiskinan antara lain ditandai oleh:

- 1) Sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan tak dapat diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju
- 2) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia

- 3) Lemahnya nilai tukar hasil produksi
- 4) Rendahnya produktivitas
- 5) Terbatasnya modal yang dimiliki
- 6) Rendahnya pendapatan
- 7) Terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Potensi sumber daya yang berasal dari sektor pertanian menjadi penting untuk disusun strategi pembangunan, sebab potensi sektor pertanian khususnya petani Padi menjadi prioritas penting seiring dengan meningkatnya konsumsi hasil produk pertanian. Untuk dapat meningkatkan hasil pertanian berdasarkan potensi yang dimiliki daerah diperlukan dukungan dana dan personil yang mampu memberikan pemahaman kepada produsen produk pertanian terkait proses hingga pasca produksi hasil pertanian. Rendahnya hasil produksi pertanian serta kurang diperhatikannya pasca produksi diperkirakan menjadi kendala dalam

meningkatkan hasil pertanian pada daerah-daerah.

Peran aparatur tingkat daerah perlu dibangun melalui peningkatan kapasitas atau kemampuan pemahaman semenjak produksi hingga pasca produksi hasil pertanian. Diharapkan peran dari Pemerintah Daerah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kota, dalam hal ini pemerintahan Daerah Kota Medan dalam rangka memberdayakan masyarakat petani padi yang ada di daerahnya. Kecamatan Medan Deli khususnya di Kelurahan Mabar Hilir merupakan daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alam akan tetapi tidak diimbangi dengan sumber daya manusianya khususnya di bidang pertanian dan kurangnya modal yang dimiliki sehingga sangat dibutuhkan peran pemerintah baik pemerintah sebagai fasilitator, dinamisator, regulator dan katalisator untuk mengembangkan

sumber daya manusia di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli.

3. METODE PELAKSANAAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mempelajari mutu atau bobot suatu benda ataupun dari suatu keadaan sosial yang sulit diukur dengan angka. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono 2016:9).

Teknik yang digunakan untuk penentuan informan menggunakan teknik sampling bertujuan (*Puporsive Sampling*) karna anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian (Husaini, 2009:45). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai adalah Observasi (*obsevation*), Wawancara (*interview*) dan Dokumentasi (*documentation*) (Husaini,2009 :52)

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. Penelitian di mulai bulan Juni s/d bulan Juli 2019, untuk memperoleh data dan informasi yang

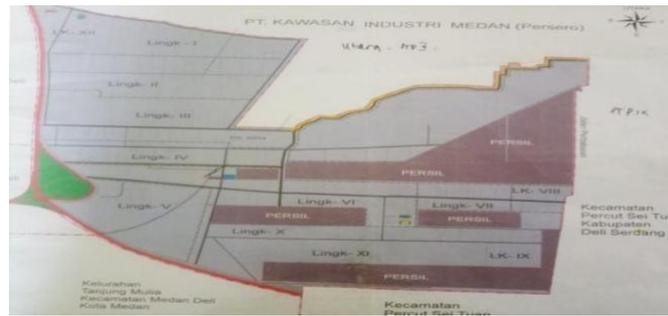
akurat untuk menjawab perm asalahan yang ada dalam penelitian ini

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Kelurahan Mabar Hilir berada dalam wilayah Kecamatan Medan Deli, dahulunya merupakan wilayah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dan Kelurahan Mabar, namun setelah terjadi pemekaran pada Tahun 1996 nama berubah menjadi Persiapan Kelurahan Mabar Hilir dengan luas wilayah \pm 315,9 Ha yang terdiri dari 12 lingkungan dengan berbatas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbayasan dengan KIM
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mabar
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Ex.PTP IX Saenstis.

Gambar 1. Peta Administratif Kelurahan Mabar Hilir



Sumber: Data Monografi Kelurahan Mabar Hilir

4.1 Peranan Pemerintah Daerah Dalam PEMBERDAYAAN Masyarakat Petani Untuk Meningkatkan Hasil Panen Padi Melalui Program Kelompok Tani

1. Langkah-Langkah Yang Ditempuh Oleh Pemerintah

Pemerintah Daerah memiliki target utama dalam program pembangunan masyarakat dimana dalam hal menetapkan aspek perindustrian seperti sumberdaya finansial, sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Adapun tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Hiryanto (dalam Ayuningtyas, 2014) yaitu melalui :

- 1) Masyarakat mengembangkan sebuah kesadaran awal bahwa dirinya dapat melakukan suatu

aktifitas untuk meningkatkan kehidupannya dan memperoleh seperangkat keterampilan agar mampu bekerja dengan baik.

- 2) Masyarakat akan mengalami penguranganperasadan ketidakmampuan dan mengalami peningkatan kepercayaan diri.
- 3) Seiring dengan tumbuhnya keterampilan dan kepercayaan diri, masyarakat bekerja sama untuk berlatih lebih banyak mengambil keputusan dan mampu memilih sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan hidup

2. Mekanisme Perekrutan Anggota

Pemerintah Daerah merekrut anggota kelompok tani dengan bekerjasama kepada elemen pemerintah dalam hal ini adalah penyuluh praktik lapangan (PPL) pertanian, kemudian pemerintah mengajak masyarakat petani untuk berpartisipasi dengan cara ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembinaan penyuluhan yang dilaksanakan oleh PPL pertanian.

3. Dampak Yang Dirasakan Pemerintah Ataupun Masyarakat

Pemerintah Daerah benar-benar menjadi aktor utama dalam memberdayakan masyarakat petani spesifiknya peran pemerintah yang paling fundamental adalah tentang bagaimana pembinaan pengetahuan kepada petani yang notabeneanya tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana bercocok tanam secara inovasi, karena dengan adanya hal-hal yang baru atau inovasi dibidang pertanian pada perkembangan saat ini, hal itu tentunya sangat mendukung petani terhadap reproduksi hasil panen padi setiap musimnya.

4. Tujuan Pemerintah Memberdayakan Masyarakat Petani

Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan kebijakan ditengah masyarakat tentu saja memerlukan komitmen atau tindakan yang benar-benar meyakinkan setiap orang ataupun kelompok masyarakat yang sudah menjadi sasaran utama kebijakan tersebut, pemerintah harus mampu melihat kondisi setiap personal masyarakatnya terhadap kendala atau masalah yang tengah dirasakan diberbagai aspek kehidupannya.

Hal diatas sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Muhammad Hamidi Jamhur selaku Lurah diKelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. (wawancara tanggal 18 Juli 2019, pukul 11:30.Wib) beliau mengatakan bahwa:

“Sebagai Pemerintah, tentu saja tujuan utama program pemberdayaan masyarakat petani ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat petani kita tentunya dibidang ekonomi salah satunya, hal yang lain juga saya rasa tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat petani tentang bagaimana sebenarnya bercocok tanam yang baik dan benar sehingga masyarakat petani itu mampu berdaya saing dalam meningkatkan hasil reproduksi panen padi, tujuan lain juga agar masyarakat petani mampu untuk menyatukan Visi-misi dan mampu

menjalin sebuah kebersamaan ditengah masyarakat lainnya.”

5. Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pemerintah

Program pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir kepada kelompok tani telah berjalan dengan baik dan sudah dirasakan oleh kelompok tani. Namun yang pasti pemerintah telah berupaya bagaimana masyarakat petani Kelurahan Mabar Hilir bisa bekerjasama dengan pemerintah dalam hal menerima program kelompok tani itu dengan turut berpartisipasi didalamnya dan hal itu tentu sudah terjadi dimasyarakat kelompok tani Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli.

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara peneliti kepada Bapak Rusman selaku ketua kelompok tani Lingkungan VI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli (wawancara tanggal 10 Juli 2019, pada pukul 10.30 Wib) beliau mengatakan bahwa:

“Kalau partisipasi masyarakat ya sangat antusias misalnya dalam hal pelebaran lahan pertanian masyarakat petani berusaha mencari lahan apakah itu mereka sewa ataupun bagi hasil ya mereka lakukan karena rata-rata lahan pertanian itu disini kurang, kemudian masyarakat petani kita disini juga bisa

saya katakan sangat menenrima program itu dari pemerintah kalau dilihat dari keaktifan mereka untuk bisa ikut terlibat menjadi anggota dan bukan hanya masyarakat petani kitapun disini rata-rata memiliki inisiatif untuk mau dibina artinya setiap ada acara-acara penyuluhan atau pembinaan dari penyuluh praktik lapangan (PPL) pertanian kita selalu menghadirinya walaupun itu dalam bentuk undangan ketempat-tempat lain bahkan menginap disuatu tempat begitu”.

6. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Petani

Peranan pemerintah dalam mewujudkan sebuah cita-cita rasa kemanusiaan dalam hal memberdayakan masyarakat yang kurang mampu/berdaya sudah menjadi alat ukur kepada masyarakat sendiri tentang bagaimana seyogianya mereka diperuntukan oleh hadirnya pemerintah sebagai fasilitator dalam mendukung masyarakat dengan cara menyediakan sarana-prasarana yang diperlukan sehingga ala hasil dari pendapatan masyarakat bisa meningkat. Dalam hal meningkatkan hasil panen padi petani di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Pemerintah Daerah harus mampu menjadi solusi terangnya pemikiran masyarakat petani artinya pemerintah harus mampu bermitra kepada orang-orang yang memiliki

pengetahuan serta pengalaman yang bisa memberikan pemahaman berupa pembinaan kepada masyarakat petani sehingga masyarakat petanipun memiliki bekal wawasan yang luas terhadap bagaimana tahapan-tahapan penanaman padi mulai dari reproduksi sampai pasca-panen.

4.2 Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Untuk Meningkatkan Hasil Panen Padi Melalui Program Kelompok Tani di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli

1. Faktor penghambat

1. Berkurangnya Lahan Pertanian

Pemerintah Daerah mengalami hambatan dalam memberdayakan masyarakat kelompok tani salah satunya adalah lahan yang semakin hari semakin sempit dikarenakan lahan tersebut kebanyakan dijadikan tempat bangunan baik bangunan rumah tangga, ataupun bangunan untuk berinvestasi seperti gedung perusahaan pabrik, sehingga hal itu menjadi indikator penghambat Pemerintah Daerah maupun masyarakat kelompok tani dalam memperluas lahan pertanian, oleh karena itu, Pemerintah

Daerah dalam hal ini sekalipun tidak bisa berbuat lebih selain hanya bisa bersosialisasi kepada pemilik tanah untuk mengizinkan tanahnya dikelola oleh masyarakat kelompok tani.

2. Lahan Pertanian

Pada dasarnya lahan pertanian diwilayah Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli mengalami masalah, dimana petani yang sedang mengusahakan lahan pertaniannya adalah bukan hak milik tetapi dalam arti kebanyakan lahan itu disewa dari pemilik tanah orang lain, sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini masih kewalahan untuk mencari lahan pertanian kepada setiap anggota kelompok tani. Dengan demikian pemerintah harus berupaya untuk mampu bekerjasama kepada masyarakat pemilik tanah agar mau melepaskan tanahnya untuk dijadikan sebagai lahan pertanian.

3. Masalah Irigasi

Salah satu persoalan yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli adalah ketidaktersediaan irigasi dilahan sawah petani, karena pada dasarnya lahan kebun sawah petani Kelurahan Mabar

Hilir termasuk kategori lahan tadah hujan sehingga masyarakat petanipun hanya bisa mengharapkan air hujan saja untuk mengairi lahan sawah setiap musimnya.

2. Faktor Pendukung

1. Dukungan dari Dinas Pertanian

Keterlibatan pemerintah yang bersangkutan dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan Kelautan telah mendukung program pemberdayaan masyarakat petani dengan menjadi fasilitator dalam hal memberikan sarana dan prasarana serta dukungan lainnya seperti memberikan pembinaan penyuluhan kepada masyarakat petani sehingga upaya pemberdayaan itu telah sampai dan dirasakan oleh masyarakat petani itu sendiri.

Hal diatas sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada bapak Muhammad Hamidi Jamhur selaku Lurah di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli. (wawancara tanggal 18 Juli 2019, pada pukul 11:30. Wib) beliau mengatakan bahwa:

“faktor pendukung program pemberdayaan masyarakat kelompok tani disini itulah yang kita kerjakan sesuai dengan landasan anggaran dasar untuk menjembatani kelompok tani yang nantinya kita mohon bantuan

dari Dinas Pertanian dan Kelautan untuk memberikan dukungan, kemudian karena ada yang berkopeten dari Dinas Pertanian dan Kelautan oleh karena itu merekalah yang mawadahi segala bantuan kepada masyarakat petani”.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian penelitian serta pembahasan tentang Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Untuk Meningkatkan Hasil Panen Padi Melalui Program Kelompok Tani di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, peneliti dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah membentuk kelompok tani bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kelautan melalui penyuluh praktik lapangan (PPL) pertanian. Kelompok tani yang dipilih latarbelakang mata pencaharian yang kurang mampu. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Kelautan sebagai wadah segala bantuan kepada masyarakat kelompok tani. Upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil produksi panen padi petani adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti

fasilitas seperti Jetor, mesin pompa air, pupuk bersubsidi, benih padi dan mesin perontok padi.

2. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan oleh peneliti mengenai faktor-faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat kelompok tani, yaitu berkurangnya lahan pertanian petani, masalah kepemilikan lahan dan masalah irigasi. Faktor-faktor inilah yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat petani di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. Kemudian faktor pendukung Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani yaitu adanya dukungan dari Dinas Pertanian dan Kelautan yang telah memberikan fasilitas petani dalam bentuk sarana dan prasarana seperti Jetor, mesin pompa air, pupuk bersubsidi, benih padi dan mesin perontok padi.

Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam beberapa kesimpulan diatas “tentang peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani untuk meningkatkan hasil panen padi melalui program kelompok tani, maka peneliti dapat menyuarakan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah Daerah berupaya untuk menetapkan kebijakan terhadap kepemilikan lahan kepada pemilik tanah agar mau melepaskan atau memberikan tanahnya kepada anggota kelompok tani secara utuh dan tidak serta-merta diambil semauanya kapan saja, sehingga masyarakat petani Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tidak kewalahan lagi untuk mencari lahan pertanian kedepannya, Pemerintah Daerah kedepannya harus memperhatikan lahan persawahan masyarakat petani dengan membangun irigasi diseluruh area lahan sawah petani di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, sehingga masyarakat petani pun

tidak kewalahan untuk mencari sumber air yang bisa dialiri dilahan sawah masing-masing.

2. Pemerintah Daerah harus lebih lagi menjalin hubungan kerja sama kepada Dinas Pertanian dan Kelautan, agar pemberdayaan masyarakat petani di Kelurahan Mabar Hilir semakin berkembang dan tidak putus ditengah jalan. Partisipasi masyarakat Kelurahan Mabar Hilir sangat diharapkan pemerintah untuk mendukung terus program-program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah sehingga hubungan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat semakin berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hikmat, Harry. 2011. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar 2009, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Istianto, Bambang. 2011. *Demokrasi Birokrasi di Era Reformasi*. STIAMI Jakarta dengan Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ryaas Rasyid, 2000. *Makna Pemerintahan ditinjau dari Etika dan Kepemimpinan*.
- Solekha, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas)*. Malang :Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Pengantar Sosiologi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugioyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta
- Sedarmayanti, 2013. *Good Governance (kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Penerbit CV. MandarMaju. Bandung.
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Suhendra, Dr.K, MSi. 2008. *Manajenen dan Organisasi dalam Realita Kehidupan*, Bandung; Mandar Maju.
- Theresia, Aprillia dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat acuan bagi praktisi, akademisi dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Alfabeta. Bandung.

Sumber Internet

Ira Ferianti, *Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan hasil panen padi melalui program kelompok tani.*

<http://www.pemberdayaanmasyarakatapetani.com.id> (diakses pada Tanggal 02 Juni 2019, Pukul 10.30 Wib)